

# **LAMPIRAN**

# Stigma Terhadap Orang Positif COVID-19

Leon A. Abdillah  
Universitas Bina Darma  
leon.abdillah@yahoo.com

## A. Pendahuluan

Dunia telah memasuki era globalisasi (Abdillah, 2019) dengan berbagai aspek terkait di dalamnya. Teknologi Informasi (TI) menjadi salah satu aspek globalisasi di bidang teknologi terkini. Dengan TI, penyampaian data dan pengolahan informasi menjadi sangat cepat, akurat, dan dapat menjangkau seluruh pelosok negara. Media sosial berbasis internet memungkinkan orang berkomunikasi tanpa batas waktu dan ruang. Saat ini ada berbagai *platforms* media sosial (mis. Facebook, WhatsApp, LINE, WeChat, Twitter, Skype) telah berkembang dengan baik (Lin, 2020). Selain sisi positif tersebut,

Jurnal Hukum POSITUM Vol. 4, No. 1, Juni 2019, Hal 36-56  
P-ISSN : 2541-7185  
E-ISSN : 2541-7193



**Implementasi Hak atas Kesehatan Menurut Undang-Undang Dasar 1945: antara Pengaturan dan Realisasi Tanggung Jawab Negara\*)**

**Hernadi Affandi\*\*)**

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung  
[hernadi.affandi@unpad.ac.id](mailto:hernadi.affandi@unpad.ac.id)

**ABSTRAK**

Perubahan UUD 1945 yang memasukkan materi muatan hak asasi manusia semakin menegaskan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia termasuk hak atas kesehatan di dalamnya. Ketentuan tersebut masih bersifat umum, sehingga memerlukan penjabaran dan pengaturan lebih lanjut ke dalam undang-undang. Selain itu, perlu pula mengetahui implementasi dari tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas kesehatan. Penelitian ini memfokuskan kepada dua masalah, yaitu: *pertama*, bagaimanakah pengaturan hak atas kesehatan di Indonesia setelah perubahan UUD 1945; *kedua*, bagaimanakah realisasi tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas kesehatan setelah perubahan UUD 1945.

**Kata kunci:** hak atas kesehatan, tanggung jawab negara, UUD 1945

**TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP JAMINAN KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF  
HAK ASASI MANUSIA**

*(State Responsibilities Of Health Guarantee In The Perspective Of Human Rights)*

**Mikho Ardinata**  
**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu**  
**[mikhoardinata@umb.ac.id](mailto:mikhoardinata@umb.ac.id)**

**ABSTRACT**

*The role of the state in meeting the basic needs of people is very important, especially in the form of comprehensive health services, where health is recognized as a human right, a set of rights that are inherent in the nature and existence of people as God's, Almighty, Indwelling and a Gift That Must Be The purpose of this research, which is respected, preserved and protected by the state, is to find out the form of state responsibility towards health insurance with regard to human rights. The type of research used in this study is normative legal research methods. The result of this study is that in fulfilling the basic rights of citizens to health, the government is obliged to ensure adequate access for all citizens to adequate and optimal health services. In an effort to respect, protect and meet government obligations through the implementation of human rights standards on the right to health.*

**Keywords :** *the role of the state; health insurance; human rights.*

**ABSTRAK**

Peranan negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar rakyat sangat diperlukan terutama di dalam bentuk pelayanan kesehatan secara menyeluruh, dengan diakui kesehatan sebagai salah satu hak asasi manusia yaitu

## MERUNUT KONSTITUSIONALISME HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA

Oleh :  
**Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.**  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

### Abstrak

Disadari bahwa kesehatan merupakan modal utama bagi pertumbuhan dan kehidupan bangsa, dan mempunyai peran penting dalam rangka mewujudkan masyarakat adil makmur dan sejahtera seperti cita-cita bernegara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Derajat kesehatan juga sangat berarti bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia yang merupakan modal dasar pembangunan nasional yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya. Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang baik, sebagai bagian dari hak asasi manusia (warga negara), maka negara wajib memenuhi hak atas pelayanan kesehatan. Dengan menggunakan optik yuridis, artikel yang diilhami oleh fenomena mengemukanya kesadaran masyarakat atas pentingnya kesehatan dan hak atas pelayanan kesehatan ini, mencoba merunut konstitusionalisme hak atas pelayanan kesehatan di Indonesia dengan melihat pengaturannya dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan bagaimana penyelenggaraannya.

**JCH (Jurnal Cendekia Hukum)**

Volume 6 Nomor 1, September 2020

e-ISSN: 2580-1678 dan ISSN: 2355-4657

Open Access: <http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekiahukum/index>



## **TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MASA PANDEMI COVID-19**

**Fradhana Putra Disantara\***

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya,  
Jl. Ketintang, Ketintang, Kec. Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60231  
e-mail: [dfradhana@gmail.com](mailto:dfradhana@gmail.com)

### ***Abstract***

*The Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) pandemic encourages the government to take various strategic steps to accelerate the handling of COVID-19. One of the strategic policies undertaken by the government is the implementation of Large-Scale Social Restrictions in various cities or districts in Indonesia. However, this abnormal policy does not mean abandoning government responsibility for all lines of community life. This legal research is aimed at analyzing the state's responsibilities in the COVID-19 pandemic and also providing formulations related to future law (ius constituendum) on the state of emergency national law. This legal research uses the statute approach and conceptual approach. Primary and secondary legal materials used in this legal research are inventoried in order to obtain proper studies and provide critical study of the legal issues discussed. The results of the study stated that state responsibility during the COVID-19 pandemic had been legitimized by existing national and international legal provisions. The Large-Scale Social Restrictions Policy (PSBB) should not derogate the principle rights of the community. For this reason, the responsibility of the state must be optimized because the community has a central position in a country. Then, a new formulation is needed as an umbrella act in the regulation of national emergency status. This is because existing laws are not relevant to current conditions.*

***Keywords:*** Responsibilities, COVID-19, Umbrella ACT, PSRR

## **PERANAN PENYELENGGARA PERLINDUNGAN ANAK DALAM MELINDUNGI DAN MEMENUHI HAK-HAK ANAK**

**Rini Fitriani**

*Fakultas Hukum Universitas Samudra, Meurandeh, Langsa-Aceh*  
rinifitriani.sh.mh@gmail.com

**Abstract**, Child protection is closely linked to the five pillars, namely, parents, families, communities, governments, local and state governments. All five are independent of each other as providers of child protection. The Child Protection are all activities to ensure and protect children and their rights in order to live, grow, develop and participate optimally in accordance with human dignity, as well as protection from violence and discrimination. Child protection strived for every child's rights are not harmed. It complements other rights ensuring that children receive what they need so they can survive, thrive and grow. But in fact, the condition of children in Indonesia is still very alarming, especially those dealing with child labor, street children, and child victims of sexual abuse, sexual exploitation, and commercial sexual exploitation. In the Children's Protection Act of violation of the protection of children's rights, in addition to a violation of human rights is also a huge barrier to the survival and development of children.

**Abstrak**, Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Perlindungan Anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang

**HAK ATAS DERAJAT PELAYANAN KESEHATAN YANG OPTIMAL**

**Rif'atul Hidayat**

**Akademisi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta**

Jalan Kaliurang KM. 14.5, Umbulmartani, Ngemplak, Umbulmartani, Ngemplak, Kabupaten Sleman,  
Daerah Istimewa Yogyakarta 55584

E-mail: [rifatul.hidayat@gmail.com](mailto:rifatul.hidayat@gmail.com)





## **Perlindungan Hak Dasar Anak pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Medan**

### ***Protection of Children's Basic Right During the Covid-19 Pandemic Period in the City of Medan***

**Muhammad Ansori Lubis\***

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Darma Agung, Indonesia

\*Corresponding Email: [Ansori.UDA@gmail.com](mailto:Ansori.UDA@gmail.com)

---

#### **Abstrak**

Anak sebagai generasi penerus diharapkan menjadi tumpuan bangsa di masa yang akan mendatang. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban untuk memenuhi hak dasar anak bagi seluruh elemen bangsa. Akan tetapi di masa pandemi sekarang ini, Peraturan Walikota Medan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Karantina Kesehatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Di Kota Medan, masihlah belum mengakomodir pemenuhan hak dasar anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hak dasar anak pada masa pandemic covid 19 di kota medan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian yang membahas aspek hukum dengan melakukan penelusuran bahan kenustakaan (*library research*) yang berorientasi kepada

---

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK MENDAPATKAN PELAYANAN  
KESEHATAN DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA**

*Irwansyah Reza Mohamad*

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gorontalo  
Jl. Prof. Dr. Mansoer Pateda, Pentadio Timur, Gorontalo, Indonesia 96212  
*e-mail: irwansyah.mohamad@umgo.ac.id*

***Abstract***

As a result of the violation of Human Rights ( HAM ) in the health care field can cause harm to people who are in desperate need of adequate provision of health services, so that the necessary law enforcement efforts against violators in health services for the community. It is intended to assure the protection of the public with regard to the violation of the right to obtain health care. In the health sector the perpetration of these violations of human rights can involve leaders of health care facilities or health workers who practice or work in health care facilities as opposed to health care legislation. This research aims to determine the result of the violation of human right in health care, so that the right to health is not achieved and law enforcement against infringement in terms of aspects of health care human rights. The specific objective is to determine the laws governing the right to obtain medical

# Covid-19 dan Hak Masyarakat atas Kesehatan\*

Siti Nurhalimah<sup>1</sup>

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta



[10.15408/sjsbs.v7i6.15324](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15324)

## Abstract

The whole world community agrees that the right to health is a basic right (Fundamental Right) that is owned by every human being. The right to health which was previously seen as merely a private matter related to the fate or gift of God, has now undergone a very large paradigm shift into a legal right (legal rights) which is certainly guaranteed by the state. In the midst of the Covid-19 pandemic that has spread to almost all regions of Indonesia, the Government must be prepared to issue various strategic policies so that it can carry out its obligations to always guarantee the fulfillment of the right to health for all people. This research uses the method of library research with the statutory approach. This research found that the Government's policy to determine the Public Health Emergency status and choosing Large-Scale Social Restrictions as an option to respond to Public Health Emergency is a wise step, besides the Government must also pay attention to the economic and fiscal sectors according to the conditions and capabilities of the country.

**Keyword:** Covid-19, Health, Society

## Abstrak

Seluruh masyarakat dunia sepakat bahwa hak atas kesehatan merupakan hak dasar (*Fundamental Right*) yang dimiliki oleh setiap manusia. Hak atas kesehatan yang sebelumnya dipandang hanya sekedar urusan pribadi terkait dengan nasib atau karunia Tuhan, kini telah mengalami pergeseran paradigma yang sangat besar menjadi suatu hak hukum (*legal rights*) yang tentunya dijamin oleh negara. Di tengah pandemi Covid-19 yang telah menyebar hampir ke seluruh wilayah Indonesia, Pemerintah harus sigap mengeluarkan berbagai kebijakan strategis agar dapat menjalankan kewajibannya untuk senantiasa menjamin



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JALAN BALAIKOTA NO. 27 TELP. (0541) 733033 / 741429 FAX. (0541) 746157  
S A M A R I N D A - K A L I M A N T A N T I M U R

Kode Pos : 7 5 1 2 1

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor : 070 / 0760 / 300.06

- A. Dasar : 1. Undang-undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi dan Penelitian;  
3. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SD 6/2/12 tanggal 5 Juli 1972 tentang Kegiatan Riset dan Survey diwajibkan melapor diri kepada Gubernur, Kepala Daerah atau Pejabat ditunjuk;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;  
5. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Samarinda;  
6. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;
- B. Menimbang : Surat dari An. Dekan, UMKT Fakultas Hukum, Nomor : 046/FHU/C.5/C/IV/2021, Tanggal 20 April 2021, Perihal Permohonan penelitian;

**Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda, memberikan Rekomendasi Kepada :**

- A. Nama/Obyek : ALDI PEBRIAN  
B. NIM : 17111024320003  
C. Program Studi : Hukum  
D. Jabatan/Tempat/Identitas : Mahasiswa Peneliti/ Universitas Muhammadiyah UMKT Fakultas Hukum Samarinda Kalimantan Timur Alamat Jl. Ir. H. Juanda No.15 Pos Samarinda / NIK. 6472031604990004/ No. HP.085609912557  
E. Untuk : 1. Mengadakan Penelitian dengan Judul Skripsi: *"(Analisis Perlindungan Hukum Hak Atas Kesehatan Bagi Anak Jalan Selama Masa Pandemi di Kota Samarinda)"*  
2. Lokasi Penelitian : Dinas Sosial Kota Samarinda  
3. Waktu Lama Penelitian : 3 (tiga) bulan  
4. Status Penelitian : Baru

**Ketentuan bagi Pemegang Rekomendasi Penelitian:**

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah kegiatan;
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud;
3. **Setelah Penelitian selesai agar menyampaikan 1 ( satu ) eksemplar laporan Kepada Walikota Samarinda Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;**

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Samarinda, 22 April 2021  
KEPADA  
BADAN  
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
**SUCIPTO WASIS, S.Pd, M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
Nip. 196703191997021003

Perihal : **Surat Pernyataan Tidak Melakukan Uji Validitas**

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum UMKT

Di-

Tempat

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aldi Pebrian

NIM : 17111024320003

Prodi : S1 Hukum

Judul Skripsi : ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS KESEHATAN BAGI ANAK JALANAN SELAMA MASA PANDEMI DI KOTA SAMARINDA.

Dengan surat ini saya menyatakan bahwa saya tidak menggunakan uji validitas dan reabilitas dikarenakan sudah pernah di uji validitas dan realible dan menggunakan metode *study literatur/studi kepustakaan*.

Demikianlah permohonan yang saya sampaikan atas perihalnya saya ucapkan terimakasih.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb**

Samarinda, 18 Juli 2021

**Pembimbing**



**Ikhwanul Muslim, S.H., M.H.**  
NIDN : 1126059101

**Pemohon**



**Aldi Pebrian**  
NIM : 17111024320003

**Mengetahui,  
Ketua**


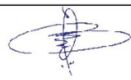

**Program Studi S1 Hukum**








**Nurcholis Alhadi, S.H., M.H.Li.**  
NIDN : 1131129101

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR  
KARTU KENDALI BIMBINGAN SKRIPSI**

**Nama Mahasiswa** : Aldi Pebrian  
**Nomor Induk Mahasiswa** : 17111024320003  
**Dosen Pembimbing** : Ikhwanul Muslim, S.H., M.H.  
**Judul Skripsi** : Analisis Perlindungan Hukum Hak Atas Kesehatan Bagi Anak Jalanan Selama Masa Pandemi di Kota Samarinda

No.	Tanggal	Hasil Bimbingan	Paraf Bimbingan
1.	27-Februari-2021	Merubah tema penelitian menjadi lebih spesifik	
2.	09-Maret-2021	Merubah tema penelitian yang awalnya <i>Studi Tentang Perlindungan Hukum Hak Atas Kesehatan Bagi Anak Jalanan Selama Pandemi Kota Samarinda</i> Menjadi <i>Analisis Perlindungan Hukum Hak Atas Kesehatan Bagi Anak Jalanan Selama Masa Pandemi Di Kota Samarinda.</i>	
3.	13-Maret-2021	melakukan perbaikan pada BAB I mengenai pendahuluan yang terlalu singkat & perbaikan mengenai rumusan masalah.	
4.	13-April-2021	Melakukan perbaikan tujuan penelitian dan manfaat penelitian dan Perbaikan dalam landasan teori dalam menentukan sub-tema dan isinya.	
5.	10-Mei-2021	Memperbaiki Kalimat-kalimat yang banyak menggunakan kata penghubung.	

6.	12-Mei-2021	Memperbaiki kutipan-kutipan yang masih salah di bagian footnote.	
7.	26-Mei-2021	Menyesuaikan kutipan jurnal, buku, dan lain-lain. Sesuai ketentuan Fakultas Hukum UMKT.	
8.	04-Juni-2021	Perbaikan dalam menentukan sub-tema pada BAB III dan memilih data yang akan dimasukkan.	
9.	10-Juni-2021	Merubah gaya tulisan yang terdapat didalam kalimat yang masih menggunakan calibri diuba ke Times New Roman.	
10.	13-Juni-2021	Menambahkan halaman motto dan memperbaiki abstrak bahasa Indonesia dan inggris.	

Samarinda, 25 Juni 2021

Pembimbing,



**Ikhwanul Muslim, S.H., M.H.**  
**NIDN. 1126059101**

# ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS KESEHATAN BAGI ANAK JALANAN SELAMA MASA PANDEMI DI KOTA SAMARINDA

*by Aldi Pebrian*

---

**Submission date:** 25-Aug-2021 10:19AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1635580627

**File name:** SKRIPSI\_ALDI\_P..docx (2.25M)

**Word count:** 15790

**Character count:** 101105



# ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS KESEHATAN BAGI ANAK JALANAN SELAMA MASA PANDEMI DI KOTA SAMARINDA

## ORIGINALITY REPORT

**48%**  
SIMILARITY INDEX

**46%**  
INTERNET SOURCES

**14%**  
PUBLICATIONS

**20%**  
STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<a href="http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id">ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id</a> Internet Source	<b>1%</b>
<b>2</b>	<a href="http://www.jogloabang.com">www.jogloabang.com</a> Internet Source	<b>1%</b>
<b>3</b>	<a href="http://repository.unhas.ac.id">repository.unhas.ac.id</a> Internet Source	<b>1%</b>
<b>4</b>	<a href="http://jurnal.iicet.org">jurnal.iicet.org</a> Internet Source	<b>1%</b>
<b>5</b>	<a href="http://jurnal.uin-antasari.ac.id">jurnal.uin-antasari.ac.id</a> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<a href="http://pt.scribd.com">pt.scribd.com</a> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	<b>1%</b>
<b>8</b>	<a href="http://www.persi.or.id">www.persi.or.id</a> Internet Source	<b>1%</b>

Submitted to Universitas Airlangga